



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 718 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FASILITASI
KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian layanan kepada masyarakat, perlu menetapkan SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.
18. Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor 526 Tahun 2026 tentang pengangkatan PPID dan Atasan PPID.

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).
- Kesatu : Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Informasi Publik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:
1. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 2. Permohonan Informasi Publik;
 3. Penanganan Keberatan Informasi Publik;
 4. Fasilitas Keberatan Informasi Publik;
 5. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pejabat UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 6. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pihak Yang Mendapat Izin Atau Perjanjian Kerja Dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 7. Uji Konsekuensi Informasi Publik;
 8. Pengelolaan Website UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 9. Penyampaian Informasi Melalui Media Sosial.
 10. Pendokumentasian Informasi Publik
 11. Penetapan dan Pemutakiran Informasi Publik.
- Kedua : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi PPID, PPID Pelaksana, unit kerja pemilik informasi, dan pihak terkait di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 12 Juni 2026

Rektor,



Sumper Mulia Harahap



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :



Disahkan oleh:
Rektor / Atasan PPID

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 197206132003121002

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.
12. Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang pengangkatan PPID dan Atasan PPID [nomor dan tahun diisi setelah verifikasi internal].

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal D3/S-1 atau kompetensi yang setara.
2. Terampil menggunakan komputer dan teknologi informasi.
3. Memahami tata kelola informasi, dokumentasi, arsip, dan layanan publik.

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik.
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
3. SOP Permohonan Informasi Publik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/laptop.
2. Jaringan internet.
3. ATK dan printer.
4. Aplikasi pengelolaan dokumen/arsip yang ditetapkan.

PERINGATAN

1. Ketidakpatuhan terhadap SOP dapat menimbulkan keterlambatan layanan, ketidakakuratan data, pelanggaran kerahasiaan, atau sengketa informasi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Register layanan.
2. Surat/disposisi dan berita acara.
3. Dokumen elektronik dan fisik sesuai retensi arsip.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :



Disahkan oleh:
Rektor / Atasan PPID

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 197203132003121002

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengidentifikasi dan mencatat dokumen yang berpotensi dikecualikan.				Dokumen; UU KIP; UU PDP; PerKI 1/2017 dan 1/2021.	Maks. 5 hari kerja	Draf awal daftar informasi yang berpotensi dikecualikan.
2	Membahas draf, dasar hukum pengecualian, konsekuensi apabila dibuka/ditutup, kepatutan, dan kepentingan umum.				Draf awal dan dasar hukum.	Maks. 6 jam	Draf lembar pengujian konsekuensi.
3	Memperbaiki draf berdasarkan hasil pembahasan.				Catatan perbaikan.	Maks. 2 hari kerja	Draf akhir hasil uji konsekuensi.
4	Menilai dan menyetujui/menolak usulan klasifikasi informasi yang dikecualikan.				Draf akhir hasil uji konsekuensi.	Maks. 5 hari kerja	Penetapan klasifikasi atau catatan perbaikan.
5	Menyimpan daftar informasi yang dikecualikan beserta lembar pengujian konsekuensi.				Dokumen yang telah disetujui.	Maks. 6 jam	Dokumen tersimpan dan terlindungi.